

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT
BAGI NASABAH PADA BANK PD. BPR SARIMADU
CABANG PEKANBARU

OLEH

JIMA BURMA TRIBUANA
NIM. 00674005023



PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010

**ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT
BAGI NASABAH PADA BANK PD. BPR SARIMADU
CABANG PEKANBARU**

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademik
Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*

OLEH

JIMA BURMA TRIBUANA
NIM. 00674005023



PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA BANK PD. BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU

OLEH : JIMA BURMA TRIBUANA

Penelitian ini dilakukan di Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No.676 Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dan langkah-langkah apa saja yang diambil dalam penanganan kredit bermasalah (macet). Ada pun kredit yang disalurkan pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru terdiri dari kredit komersil / modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dan dokumentasi yang dimiliki oleh Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2007-2008 kredit investasi merupakan kredit yang paling besar jumlah kredit macetnya dibandingkan dengan kredit modal kerja dan konsumtif, yaitu 0,83 % dan 1,40 %. Hal ini disebabkan bank tidak meminta laporan keuangan terhadap calon debitur yang mengajukan kredit. Setelah kredit dicairkan oleh debitur maka pemantauan secara berkala tidak dilakukan oleh pihak bank. Pada struktur organisasi Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru tidak terdapat adanya debt collector, sehingga penagihan kredit macet dilakukan oleh bagian kredit. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi rangkap tugas. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan sistem keputusan pemberian kredit Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru masih belum dilakukan secara efektif dan efisien kepada nasabahnya.

Kata kunci: Sistem keputusan pemberian kredit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1. Lokasi Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu	11
2.2 Struktur Organisasi	16
2.3 Bagian Unit Kerja Bank PD. BPR Sarimadu	17
2.4 Aktivitas Perusahaan Bank PD. BPR Sarimadu	27
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	29
1.6 Pengertian Sistem.....	29
1.7 Pengertian Kredit	30
1.8 Unsur-Unsur Kredit	32
1.9 Tujuan dan Fungsi Kredit	33
1.10 Jenis-Jenis Kredit	37
1.11 Jaminan Kredit	41
1.12 Prosedur Pemberian Kredit	43
1.13 Pandangan Islam Tentang Kredit	47

B. Tinjauan Praktek	51
3.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru	51
3.2 Langkah-Langkah Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru Dalam Penanganan Kredit Bermasalah (macet)	55

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memacu perkembangan kegiatan perekonomian Indonesia, fungsi dan peranan perbankan dewasa ini semakin menduduki tempat penting, hal ini disebabkan oleh karena perbankan merupakan penopang hampir seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi baik dibidang industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa lainnya.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.

Mengingat pentingnya kedudukan Lembaga Keuangan Perbankan, maka pemerintah menyusun suatu Undang-undang yang mengatur lembaga Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. **(Dahlan Siamet:2001;87)**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. **(Susilo:2000;69)**

Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dapat menyalurkan kredit, mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai kosekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relatif tinggi dari pada aktiva yang lain.

Kredit yang akan diberikan suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur, ini bearti suatau lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau sudah lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit

tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat membutuhkannya, karena itu semua sangat berisiko bagi pihak lembaga kredit.

Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra bank itu sendiri harus baik dalam menjaga *image* (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik bank itu sendiri.

Bank PD. BPR Sarimadu Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Ujungbatu, Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor. 609/IX/1986, dan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 41/V/Perek/1987, tentang Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Kampar yang ditetapkan di Ujungbatu.

Dengan dilakukan pemekaran wilayah Kabuten Kampar, maka kantor pusat yang di Ujungbatu yang berada pada wilayah pemekaran, di pindah statuskan menjadi kantor cabang Ujungbatu dan kantor cabang Pekanbaru yang terletak Jl. Soekarno Hatta Nomor. 676. Bank PD. BPR Sarimadu Bangkinang ditingkatkan statusnya menjadi kantor pusat pada tanggal 2 September 2002.

Nama PD. BPR Ujungbatu dirubah menjadi Bank PD. BPR Sarimadu dengan izin Bank Indonesia No. 6/1KEP.PBI/BPR/2004 tanggal 3 Febuari 2004 tentang perubahan nama Bank PD. BPR Ujungbatu menjadi Bank PD. BPR Sarimadu serta Perda Kabupaten Kampar Nomor. 09 Tahun 2000 tentang Bank PD. BPR Sarimadu..

Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru sampai saat ini telah menyalurkan kredit yang terdiri dari modal Kerja, Kredit Konsumtif, dan Kredit *Channeling* (kerja sama antara pemilik dana dengan suatu bank). Kredit yang disalurkan ini berasal dari dana sendiri dan kerja sama Pemda Kampar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan dan jasa maupun dalam bidang pertanian dan sektor lainnya. Faktor yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam mengurangi timbulnya resiko kredit tidak dikembalikan sesuai dengan kesepakatan oleh debitur, maka jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dalam arti kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai waktu yang dijanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Indonesia selaku pengawas dan pengatur perbankan di Indonesia menetapkan ketentuan umum dalam pemberian kredit melalui Analisis 5C, yaitu penilaian terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (angunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi).

Secara garis besar prosedur pemberian kredit kepada debitur pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.
2. Permohonan kredit yang diajukan debitur diserahkan kepada bagian kredit untuk diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pimpinan memberikan intruksi pada bagian kredit untuk meninjau usaha nasabah.
4. Bagian kredit melaporkan kepada pimpinan atas hasil pemeriksaannya, dan pimpinan akan memutuskan apakah layak atau ditolak permohonan kredit tersebut.

Perkembangan jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru selama dua tahun kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel.

TABEL 1.1
KREDIT YANG DISALURKAN PRIODE 2007-2008

No	Jenis Kredit	Tahun 2007 (Baki Debet) Rp	Tahun 2008 (Baki Debet) Rp
1.	Kredit Modal Kerja	1.181.000.000	1.444.000.000
2.	Kredit Invetasi	1.174.000.000	2.890.000.000
3.	Kredit Konsumtif	14.201.000.000	22.250.000.000
	Total	16.556.000.000	26.584.000.000

Sumber : Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru

TABEL 1.2
DAFTAR POSISI KUALITAS KREDIT YANG DISALURKAN PRIODE 2007-2008

No	Keterangan	Tahun 2007 (Baki Debet) Rp	%	Tahun 2008 (Baki Debet) Rp	%
I	Kredit Modal Kerja				
	a. Lancar	1.160.923.000	98,3	1.412.9574.000	97,85
	b. D.P Khusus	7.676.500	0,65	7.653.200	0,53
	c. Kurang Lancar	2.363.000	0,2	2.599.200	0,18
	d. Diragukan	1.299.100	0,11	2.166.000	0,15
	e. Macet	8.739.400	0,74	18.627.000	0,29
	Sub Total	1.181.000.000	100	1.444.000.000	100
II	Kredit Invetasi				
	a. Lancar	1.153.042.000	98,21	2.827.865.000	97,85
	b. D.P Khusus	7.631.000	0,65	12.131.700	0,42
	c. Kurang Lancar	2.348.000	0,2	5.202.000	0,18
	d. Diragukan	1.291.400	0,11	4.335.000	0,15
	e. Macet	9.687.600	0,83	40.466.300	1,40
	Sub Total	1.174.000.000	100	2.890.000.000	100
III	Kredit Konsumtif				
	a. Lancar	13.959.583.000	98,3	21.771.625.000	97,85
	b. D.P Khusus	92.306.500	0,65	117.925.000	0,53
	c. Kurang Lancar	28.402.000	0,2	42.680.000	0,19
	d. Diragukan	15.621.100	0,11	33.375.000	0,15
	e. Macet	105.087.400	0,74	284.395.000	1,28
	Sub Total	14.201.000.000	100	22.250.000.000	100
	TOTAL	16.556.000.000		26.584.000.000	

Sumber : Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru

Berdasarkan Penelitian pendahuluan pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah NPL (*Non Performing Loan*) kredit investasi dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit macet pada kredit investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2007-2008 yaitu 0,83 % menjadi 1,40 %.
2. Tidak terdapat pemantauan (*monitoring*) terhadap usaha debitur setelah kredit yang dicairkan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap usaha debitur secara berkala minimal per 3 bulan. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank adalah tindakan penilaian atas kesehatan pinjaman dari debitur. Hal ini tidak sesuai dengan pemantauan (*monitoring*) yang ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik tentang komponen pengendalian intern.
3. Tidak terdapat pemisahan tugas antara analisis kredit dengan *Debt Collector*. *Debt Collector* tidak terdapat dalam struktur organisasi. Analisis kredit selain melakukan analisis terhadap permohonan kredit debitur, juga melakukan penagihan pada debitur yang tidak lancar pembayaran kreditnya. Ini jelas bahwa analisis kredit merangkap tugas.

Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif kepada nasabahnya. Sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat diawasi dan dikendalikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap analisis sistem keputusan pemberian kredit

bagi nasabah pada Bank PD.BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dan menuangkan dalam bentuk laporan akhir dengan judul **“ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH PADA BANK PD. BPR SARIMADU CABANG PEKANBARU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis membuat perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru?
2. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Bank PD. Sarimadu Cabang Pekanbaru dalam penanganan kredit bermasalah (macet)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem keputusan pemberian kredit bagi nasabah pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Bank PD. Sarimadu Cabang Pekanbaru dalam penanganan kredit bermasalah(macet).

Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sendiri berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah.
- b. Bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian kepada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dalam hal penyaluran kredit.
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- d. Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga pada program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dari bulan Oktober s/d November 2009, pada bagian Kasi Kredit.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang belum diolah oleh perusahaan, seperti dokumen maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh perusahaan mengenai sistem keputusan pemberian kredit.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah diolah oleh perusahaan dalam bentuk jadi, seperti : sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan pengumpulan data.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada pengurus Bank PD. BPR Sarimadu Bagian Kasi Kredit untuk memperoleh informasi mengenai Sistem keputusan pemberian kredit yang diterapkan.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian pengumpulan data dengan pembahasan yang diambil dari literature-literatur, bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan penulisan laporan praktek ini, penulis membagi pembahasan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini memuat gambaran umum Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru yang meliputi Sejarah Bank PD. Sarimadu, Struktur Organisasi dan aktivitas Bank PD. Sarimadu.
- BAB III : Pembahasan, membahas tentang Tinjauan Teori dan Praktek.
- BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang penulis berikan yang berguna bagi Bank PD. Sarimadu Cabang Pekanbaru.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Bank PD. BPR Sarimadu

Bank PD. BPR Sarimadu yang berada di jalan Soekarno Hatta No. 676 Pekanbaru tidak lahir dengan sendirinya, semula bernama Bank PD. BPR Ujungbatu yang didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 03 tahun 1989. No. 01 tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 067/ KM. 13/ 1992 tentang izin Operasional Bank PD. BPR Ujungbatu. Bank PD. BPR Ujungbatu merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemda Kampar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau No. 609/ IX 1986, tentang pembentukan Badan Kredit Kecamatan masing-masing satu unit pada setiap Kabupaten Se-Propensi Riau. Sesuai dengan SK Gubernur tersebut maka Bupati Kampar yang saat itu dijabat oleh Bapak H. Saleh Djasit, SH mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 41/V/Perek/1987, dan telah menetapkan untuk badan kredit Kecamatan di Kabupaten Kampar yang di tempatkan di Ujungbatu Ibukota Kecamatan Tandun dengan nama BADAN KREDIT KECAMATAN UJUNGBATU (BKK UJUNGBATU) dengan modal awal berupa pinjaman pada BPD Riau untuk operasional BKK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Badan Kredit Kecamatan tersebut bergerak sebagai lembaga keuangan non bank yang meng himpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan memberi

bantuan modal kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk pinjaman.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dibidang perbankan yang dikenal dengan Paket Kebijaksanaan Oktober 1988 (FAKTO 88) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 27 Oktober 1988, maka Badan Kredit Kecamatan, dan usaha yang sejenis agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi Institusi Perbankan yang bernama Bank Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka Gubernur Propensi Riau dengan Surat Keputusan Nomor 539/PSD/86.18, tanggal 18 Desember 1988 mengintruksikan kepada Bupati Kampar untuk mempersiapkan pendirian PD. Bank Perkreditan Rakyat dalam wilayah masing-masing kabupaten. Sejalan dengan persiapan tersebut, Gubernur Riau telah menyerahkan Badan Kredit Kecamatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing dan selanjutnya bagi Badan Kredit Kecamatan yang potensial agar ditingkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan kebijakan dari Gubernur Propensi Riau tersebut maka Bupati Kampar yang pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Saleh Djasit, SH menugaskan kepada Kepala BKK Ujungbatu untuk mempersiapkan akte pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu dalam bentuk peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang telah disepakati oleh DPRD Kampar dan disetujui oleh Gubernur Riau dengan Perda Nomor 03 tahun 1987. Setelah Perda tersebut disetujui oleh Gubernur Riau, kembali Bupati kampar menugaskan Kepada BKK

Ujungbatu untuk mengurus izin operasional Bank PD. BPR Ujungbatu yang akhirnya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 067/KM. 13/92, terwujudnya Bank PD. Ujungbatu tersebut tidak terlepas dari pembinaan yang intensif dari Bank Riau.

Dengan demikian Bank PD. BPR Ujungbatu adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kampar yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 tahun 1989 dan beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep. 067/ KM. 13/92, tentang Izin Operasional Bank PD. BPR Ujungbatu, tanggal 16 Maret 1992. Dengan izin tersebut, Bank PD. BPR Ujungbatu mulai beroperasi hingga sekarang.

Sejak beroperasinya Bank PD. Ujungbatu, BPD Riau tetap memberikan pembinaan sampai dengan saat ini. Dalam hal ini, Bank Indonesia Cabang Pekanbaru selalu melakukan pembinaan secara intensif dengan selalu memberikan arahan untuk perkembangan Bank PD. BPR Ujungbatu kearah terciptanya operasional bank yang SEHAT dan berperan aktif di tengah-tengah masyarakat perdesaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar membuat kebijaksanaan dalam upaya pembinaan terhadap Bank PD. BPR Ujungbatu yang memberikan peluang dalam penciptaan operasional bank yang sehat dan dinamis. Diantara kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kampar adalah:

- 1) Setiap tahun tetap menganggarkan APBD Kabupaten Kampar untuk tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada Bank PD. BPR Ujungbatu.
- 2) Menetapkan kembali bagian laba Bank PD. BPR Ujungbatu untuk Pemda Kampar sebagai tambahan penyertaan Modal Pemda Kampar Kepada Bank PD. BPR Ujungbatu.
- 3) Memberikan arahan pada setiap perencanaan Bank PD. BPR Ujungbatu dalam upaya penciptaan operasional dan pengembangan Bank secara sehat dan wajar.
- 4) Memberikan arahan untuk mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan.
- 5) Memberikan dukungan moril kepada segenap pengelola bank untuk dapat berkerja secara baik, dalam hal selalu dilakukan oleh Bupati Kampar pada saat melakukan kunjungan ke daerah kerja Bank PD. BPR Ujungbatu.

Sehubungan dengan perkembangan kegiatan operasional dan sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, Perda tersebut di atas dirubah dengan Perda Kabupaten Kampar No. 04 tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujungbatu dengan modal dasar bank sebesar Rp 2.000.000.000,- yang sahamnya dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kampar sebagai pemegang saham mayoritas dan Bank Riau. Pada tahun 2003 Perda Kabupaten Kampar No. 09 tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu. Sesuai dengan Perda sebagaimana dimaksud ditetapkan bahwa:

1. Kepemilikan saham Bank PD. BPR Sarimadu 100% dimiliki sepenuhnya oleh Pemda Kampar.
2. Modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,-

2.2. Bagian Unit Kerja Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru

1. Direksi

Direksi terdiri dari Direktur utama dan direktur, direktur mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas serta pengendalian terhadap bagian pimpinan cabang berdasarkan atas pertimbangan dan keserasian.

Tugas Direksi :

1. Memimpin Bank berdasarkan kebijaksanaan umum.
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank kepada Dewan Pengawas.
3. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank. Berdasarkan kebijaksanaan umum.

2. Pemimpin Cabang

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan antara lain:

Tugas Pimpinan Cabang :

1. Melakukan penyusunan rencana kerja dan Anggaran kantor cabang.

2. Melakukan bahan masukan kepada Direksi sebagai pertimbangan untuk proyeksi pengembangan Bank pada masa yang akan datang.
3. Melakukan pengawasan, pemantauan serta memberikan masukan terhadap seluruh Kegiatan pada kantor cabang.

3. Kasi Operasional

Tugas :

1. Melakukan pengadaan barang /persediaan untuk kegiatan operasional Bank dengan berkoordinasi dengan bagian umum dan personalia kantor pusat.
2. Memantau biaya-biaya dikeluarkan baik untuk keperluan Pemimpin, Cabang, Maupun Keperluan Kantor.

4. Pelaksana Pembukuan

Struktur organisasi pembukuan mewabahi:

1.Seksi Akuntansi

2.Seksi Pelaporan

Kepala Pembukuan

Kepala pembukuan mempunyai tugas antara lain :

1. Memonitor dan memastikan bahwa pembukuan bank telah menggambarkan kondisi bank sesungguhnya, sesuai dengan PAP I serta ketentuan yang berlaku.

2. Merencanakan dan mengusulkan kewajiban-kewajiban dan langkah-langkah strategis dalam bidang pembukuan kepada direksi untuk kelancaran operasional bank.
3. Melakukan koordinasi pada tiap bagian yang berkaitan dengan bagian pembukuan.
4. Membuat laporan rutin setiap bulan
5. Membuat perintah bayar dan melaporkan biaya kepada pimpinan Cabang
6. Membuat laporan evaluasi anggaran dan laporan tahunan.

A. Pelaporan pembukuan

Bagian pembukuan mempunyai tugas antara lain:

1. Memonitor dan memastikan bahwa pembukuan bank telah menggambarkan kondisi bank sesungguhnya, sesuai dengan PAP Im serta ketentuan yang berlaku.
2. Merencanakan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam bidang pembukuan kepada direksi untuk kelancaran operasional bank.
3. Melakukan koordinasi pada tiap bagian yang berkaitan dengan bagian pembukuan.
4. Membuat laporan evaluasi anggaran dan tahunan.

B. Pelaksanaan Rumah Tangga

1. Kepala rumah tangga membawahi langsung pelaksana administrasi, umum dan rumah tangga.

2. Pelaksanaan rumah tangga mempunyai tugas sebagai berikut:
3. Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris.
4. Membantu personalia barang dan melakukan penyusutan.
5. Menjalankan dan mengawasi pelaksanaan teknis operasional bank.

Pelaksanaan Administrasi Umum dan Rumah Tangga

Pelaksanaan Administrasi, umum dan rumah tangga bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemeliharaan barang inventaris
2. Pengelolaan rupa-rupa aktiva

C. Driver

Bagian driver mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan dan mengkoordinasi penyelenggaraan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan data dari setiap bagian, kantor cabang, pihak Ekstern dan Intern sesuai dengan kemampuan dan peluang yang tersedia.
- b. Membuat kajian pengembangan bank dan produk bank.
- c. Melakukan perencanaan promosi dan kerja sama bank dengan pihak ketiga lainnya.
- d. Mengawasi operasional sistem aplikasi perusahaan dan manajemen sistem informasi.
- e. Bertanggung jawab atas proses awal hari aplikasi perbankan.

5. Kasi Dana

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dana pengarahan tugas
- b. Memonitor perkembangan dana
- c. Meminta persetujuan direksi untuk melakukan pemindahan dana antar bank dan kantor
- d. Bertanggung jawab laporan transaksi yang mecurigakan kepada PPATK

Kepala kasi dana mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan pelaksanaan tugas pelaksana bawahannya
- b. Menampung dan melayani keluhan/pengaduan nasabah dan mengusahakan penyelesaiannya melalui kepala kasi dana
- c. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap nasabah sehingga menarik nasabah untuk mendapatkan dananya pada bank
- d. membuat laporan dana pihak ketiga dan laporan gabungan untuk kebutuhan laporan BI
- e. Membuat surat dan pemindahan bakulan untuk keperluan transfer dana

Tugas harian antara lain:

- a. Mengontrol penghimpunan dana deposito, penetapan Special Rate serta pemberian Sic bagian pegawai sesuai dengan ketentuan yang ada
- b. Memposting setiap pemindahan yang berhubungan dengan tabungan
- c. Mermbuat surat dan pemindahan bukuan untuk keperluan dana transfer.

6. Kasi Dana

Tugas:

1. Memonitor perkembangan dana
2. Melakukan administrasi keluar masuk dana

A. Costumer Servis Dana

Pelaksanaan pelayanan dan informasi nasabah (*Costumer Service*) dan mempunyai tugas yaitu:

1. memberikan informasi kepada nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang tabungan, deposito serta produk bank lainnya
2. menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukuan rekening tabungan dan deposito
3. melayani nasabah dalam pembukuan rekening tabungan/deposito baru serta mengarahkan nasabah dalam berhubungan dengan teller

B. Teller

Teller mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menerima uang setoran dan menyebarkan uang penarikan tabungan atau deposito.
2. Mengadministrasikan (posting) mutasi tabungan dan deposito dalam aplikasi tabungan.
3. Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar.
4. Mengadministrasikan dan mencatat *Vaucer* ke buku kas.

5. Melayani penarikan dana simpanan pihak ketiga.

6. Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai.

7. Kasi Kredit

Memonitor rekening-rekening pinjaman dan aktivitas usaha debitur keseluruhan.

Tugas pokok bagian kredit sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas pelaksana tugas bawahan.
2. Mengajukan kepada direksi dan atau kepada yang berwenang untuk memutuskan kredit terhadap permohonan kredit calon debitur.
3. Mengambil keputusan terhadap permohonan kredit yang diajukan dalam batas wewenagnya.
4. Mengawasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
5. Melakukan kontrol terhadap kredit hapus buku (Ph)
6. Melanjutkan keputusan tim verifikasi dana bergulir.

Tugas untuk harian adalah:

1. Mengawasi proses transaksi penyaluran dan penyetoran kredit.
2. Mengajukan klaim asuransi kepada bagian yang menangaani penyelesaian asuransi jiwa.
3. Melaporkan perkembangan kredit kepada direksi.
4. Membuat laporan kredit secara keseluruhan kepada Bank Indonesia atau pihak lain.

5. Bertanggung jawab atas laporan kredit dana bergilir yang disampaikan melalui direksi kepada tim verifikasi bergilir.

A. Analisis Kredit

Pelaksanaan analisis kredit bertugas sebagai berikut:

1. Mencari calon debitur yang potensial .
2. melakukan kunjungan on tge spot ketempat usaha, jaminan, dan tempat tinggal calon debitur
3. Melakukan analisa terhadap calon debitur dalam rangka menilai kebutuhan pinjaman dan pengguna kredit.
4. Melakukan pembinaan nasabah.

B. Penagihan Kredit

1. Penagihan kredit membawahi langsung pelaksanaan penagihan kredit.
2. penagihan kredit mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. a.Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan pelaksana bawahannya.
 - b. b.Melakukan pembinaan dan pengawasaa terhadap debitur yang sudah mendapatkan fasilitas kredit.
 - c. c.Memperbaiki kondisi NPL dengan melakukan penagihan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah.
3. Tugas harian sebagai berikut:
 - a. Meninventarisir dan melaporkan serta berkonsultasi kepada kepala bagian kredit dalam hal penanganan kredit bermasalah.

- b. Membuat laporan kunjungan terhadap debitur bermasalah.

Pelaksanaan Penangihan Kredit sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan melaporkan serta berkonsultasi dengan kepala seksi penagihan dalam hal penanganan kredit bermasalah.
- b. Melakukan kegiatan untuk penyelesaian kredit bermasalah.

C. Administrasi kredit

1. Administrasi kredit membawahi langsung pelaksana administrasi kredit.
2. Administrasi kredit mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan pelaksanaan tugas pelaksana bawahannya.
 - g. Memastikan kelengkapan persyaratan permohonan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - h. Memelihara dokumen perkreditan yang up to date.
 - i. Melakukan sinkronisasi posisi saldo kredit dengan program aplikasi perbankan.
 - j. Mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit.

Pelaksanaan Administrasi Kredit

Pelaksanaan administrasi kredit mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan proses administrasi kredit dan membuat perjanjian kredit.
- b. Membuat daftar asuransi kepada pihak pengelola asuransi.

- c. Menyelesaikan seluruh transaksi harian.
- d. Menyimpan/mengarsipkan seluruh dokumen kredit sehingga dipastikan dalam kondisi aman terjaga.

8. Kasi Kredit Bakulan

1. Kredit bakulan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, pengawas dan pengarahan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan bawahannya.
- b. Menganalisa kelayakan usaha dan seluruh berkas pengajuan permohonan kredit bakulan.
- c. Menyampaikan analisa dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan yang perlu diambil untuk pengembangan kredit bakulan.
- e. Membuat rekomendasi kredit yang telah dianalisa.

2. Tugas harian antara lain:

- a. Melakukan kunjungan ketempat tinggal dan tempat usaha dalam rangka pemantauan terhadap usaha yang dijalankan calon debitur.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang calon debitur untuk pengambilan keputusan kredit.

A. Pelaksanaan Kredit Bakulan

Pelaksanaan kredit bakulan mempunyai tugas pokok:

- a. Mencari debitur yang potensial dan produktif.
- b. Mencari calon nasabah yang potensial

- c. Memberikan pertimbangan terhadap rencana tindakan yang dilakukan dalam pembinaan nasabah.

2.3 Aktivitas Perusahaan

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank PD. Sarimadu Cabang Pekanbaru adalah:

1. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu yaitu tabungan tamasa dan tabungan sarimadu.
2. Tabungan berjangka yang dapat ditarik setelah jatuh tempo yaitu tabungan deposito.
3. Kredit Modal Kerja

Yaitu untuk tujuan meningkatkan dan mengembangkan berbagai usaha antara lain: perdagangan, rumah makan, industri kecil, berbagai sektor usaha jasa, pertanian, perternakan, perikanan, dan perkebunan. Kredit modal kerja dibagi menjadi 4 bagian antara lain

- a. Kredit wirausaha
 - b. Kredit bakulan (mikro)
 - c. Kredit PHBK
 - d. Kredit agribisnis
4. Kredit konsumtif

Kredit yang disalurkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai perusahaan yang sifatnya konsumtif.

5. Kredit Kepala Anggota Koperasi

Kredit untuk anggota koperasi yang dapat dipergunakan untuk serbaneka kegunaan.

6. Kredit Channeling

Kredit kerja sama antara Pemda Kabupaten Kampar dengan PD. BPR Sarimadu, dengan sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Kampar.

2.4 Visi dan Misi Bank

Visi:

Bank Sarimadu merupakan wahana pengembangan ekonomi daerah berbasis kerakyatan melalui optimalisasi pelayanan perbankan.

Misi:

- 1). Peningkatan mutu sumber daya manusia secara profesional, memiliki kemauan dan kejujuran serta berhak mulai dan memiliki loyalitas yang tinggi.
- 2). Sistem manajemen dan operasional bank yang menuju kepada peningkatan pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada manajemen resiko.
- 3). Penyediaan kredit untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan secara sehat dan wajar.
- 4). Memberikan rasa aman, nyaman, dan menguntungkan kepada masyarakat sebagai pemegang amanah dan kepercayaan penyimpan dana.
- 5). Pemumpukan permodalan yang dibarengi dengan peningkatan kontribusi bagian laba sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar baik langsung maupun tidak langsung sebagai implementasi dari pembinaan yang berkelanjutan.

- 6). Perluasan wilayah kerja dengan merealisasikan pembukaan kantor cabang dan kantor kas pada lokasi yang potensial, strategis, dan dekat dengan nasabah.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

3.1 Pengertian Sistem

Beberapa ahli akuntan memberikan pendapat yang berbeda mengenai sistem, untuk mendapat pengertian yang lebih jelas terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian sistem.

Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. **(Mulyadi :2001;5)**

Menurut pendapat dari Moscovice:

Sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (*sub system*) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen yang saling berkaitan (*interrelated*) atau subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. **(James A. Hall:2001;5)**

Sistem adalah kumpulan elemen-elemen untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan terdiri dari dua atau lebih subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. **(Jugianto:2005;152)**

Sistem adalah sekelompok bagian (alat/sebagian) yang berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. **(Kencana Syafei:2003;2)**

Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bertantungan satu sama lain dan terpadu. **(Wahyudi dan Subandi:2001;8)**

Berdasarkan pendapat dari para ahli yang telah dikemukakan diatas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah merupakan suatu alat yang terdiri dari prosedur-prosedur berupa satu kesatuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan utama perusahaan.

3.2 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa lain “*credre*” yang berarti *percaya*. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. **(Melayu:2002;87)**

Kredit merupakan suatu kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar, kepercayaan ini didasarkan atas sesuai perjanjian. Jadi adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar hutang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Ia mengacu pada upaya seseorang untuk menggunakan barang dagangan seseorang, dengan janji akan membayarnya kembali setelah barang dagang itu laku. **(Muslihuddin.2004;32-34)**

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang. (**Suyatno:2007;12**)

Menurut OP.Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (Misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (Kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. (**Budi Untung :2000;1**)

Sedangkan pengertian kredit menurut undang-undang nomor 7 tahun 1999 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan :

Kredi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutang nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Yang dimaksud dengan perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dipesembahkan dengannya, yang didasari atas pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dimana sebagai imbalan jasanya pihak kreditur diberikan hak untuk mendapatkan bunga selama masa kredit itu berlangsung.

3.3 Unsur-unsur kredit

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang ataupun jasa akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Paktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang

dikenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. (**Kasmir:2002;103**)

3.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam prakteknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bankl maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan berbagai sektor, terutama sector riil.

Tujuan pemberian kredit menurut. **(Suhardjono:2003;161)**

Tujuan pemberian kredit tersebut oleh bank pemerintah adalah:

1. Turut mengsucceskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tercermin dan dapat memperluas usahanya.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a). Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b). Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau peluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c). Meningkatkan barang dan jasa
- d). Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk yang sebelum diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- e). Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai oleh keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan suatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.

3. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambahkan atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat membesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. **(Kasmir:2002;105)**

3.5 Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dilihat Dari Segi Kegunaanya

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

Contoh: misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

Masa pemakaiannya untuk satu priode yang relative lebih lama dan dibutuhkan modal yang relative besar.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk kepeluan meningkatnya produksi dan operasionalnya.

Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Contoh: Kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Contoh: Kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perobatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan hasil dari penjualan barang dagangan tersebut. Contoh: Kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contoh: Untuk peternakan, kredit peternakan misalnya ayam, kredit pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

Contoh: kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sekor perkebunan atau pertanian. Sektor uasaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit perternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sector perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang misalnya ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. jenis usaha tambang yang dibiayainya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit propesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti, dosen, doktor atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit yang membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- h. Dan sector-sektor lainnya. **(Kasmir:2002;109)**

3.6 Jaminan kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah sungguh- sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambarnya.

Dalam praktiknya, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin / peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman / kebun / sawah
 - g. Dan lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti:
 - a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah

- d. Sertifikat deposito
- e. Rekening tabungan yang dibekukan
- f. Rekening giro yang dibekukan
- g. Promes
- h. Wesel
- i. Dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan Orang atau Perusahaan

Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberi jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

4. Jaminan Asuransi

Jaminan asuransi yaitu bank yang menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

(Kasmir:2006;81)

3.6 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan sistem pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: **(Kasmir:2006;96-102)**

1). Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal satu kredit hendaklah berisi tentang:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu.
- d. Cara permohonan pengambilan kredit, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:
 - a) Akte pendirian perusahaan

- b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon
- c) T.D.P (tanda daftar perusahaan)
- d) N.PW.P (nomor pokok wajib pajak)
- e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- f) Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
- g) Daftar penghasilan bagi perorangan
- h) Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan.

2). Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang diperlu perhatikan adalah membutuhkan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

3). Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis/operasi
- e. Aspek manajemen

f. Aspek ekonomi social

4). Wawancara pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5). Peninjauan ke lokasi (on the spot)

Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam proposal.

6). Wawancara kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kecurangan-kecurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

7). Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak atau tidak layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administasinya biasanya keputusan kredit akan mencakup:

a). Akad kredit yang akan ditanda tangani

b). jumlah uang yang diterima

c). Jangka waktu kredit

d). Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8). Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit. Sebelum kredit maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat penjaminan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antar bank dan debitur secara langsung
- b. Melalui notaris

9). Realisasi kredit

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah menandatangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan:

- a. Sekaligus
- b. Atau secara bertahap

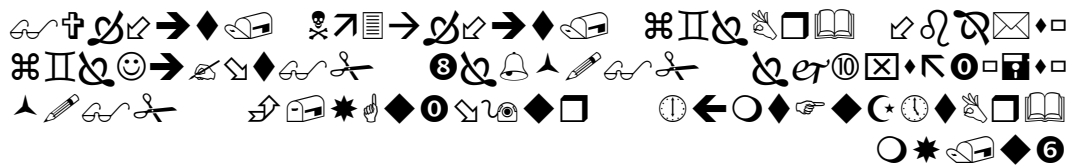
3.8 Pandangan Islam Tentang Kredit

Kredit adalah seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain, percaya bahwa penerima kepercayaan dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, baik uang maupun barang.

Syarat-Syarat Kredit

Syarat-syarat kredit ini diambil dari Depag RI tahun 2000

1. Jujur, dengan atas dasar surat Al Baqarah ayat 283



Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menggunakan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhan nya” (Depag RI,2000:71) .

Orang yang jujur yaitu yang dapat dipercayai, kejujurannya adalah hal yang sangat penting. Bila pelaku ekonomi dapat dipercayai maka pihak Koperasi akan memberi fasilitas-fasilitas dengan kemudahan-kemudahan. Dimana bila Koperasi memberikan amanat kepada nasabah berupa pinjaman, maka pelaku ekonomi harus memegang amanah tersebut.

2. Tepat waktu, surat Al-Maidah ayat 1



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

(Depag RI, 2000:6)

Dalam perekonomian khususnya pada sektor pengkopersian tepat waktu sangat diperhatikan, dimana nasabah maupun pihak koperasi dituntut untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam mengembangkan usahanya. Dengan tepat waktu diharapkan akan menghasilkan keuntungan sesuai batas waktu dalam kesepakatan.

Kredit Ditinjau Dalam Hukum Islam

Kredit yang diberikan koperasi kepada nasabah tidak terlepas dari pemberian bunga. Jika ditinjau dari hukum islam, maka bunga kredit bertentangan ajaran islam karena pandangan islam bunga disamakan dengan riba.

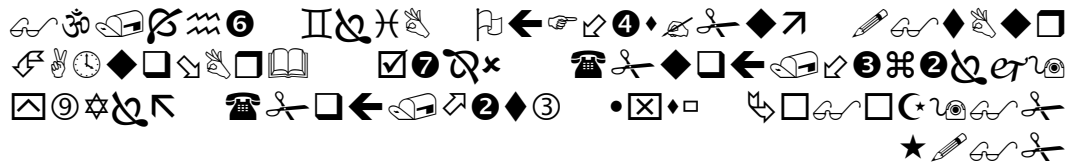
Riba menurut bahasa adalah Az-ziadah (tambahan) yang dimaksud disini ialah tambahan modal baik sedikit maupun banyak. Riba juga bertambah, berkembang atau bertumbuh.

Dalam muamalah riba itu ada dua macam, yaitu :

1. Riba Nasi'ah ialah tambahan yang dipersyaratkan akan diambil oleh kreditur dari debitur sebagai imbalan pengukuhan waktu yang diberikan oleh pihak kreditur untuk melunasi hutang baik ketika hutang itu akan dilakukan maupun ketika debitur meminta penangguhan.
2. Riba Fadhal adalah kelebihan yang dihasilkan karena perbedaan sifat barang yang diperjualbelikan.

Menyangkut kategori bunga kredit maka hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah karena adanya persamaan jenis. Larangan riba nasi'ah mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif didepan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu menurut syari'ah tidak diperbolehkan.

Ayat Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman tentang adanya larangan
riba: Surat Ar-rum ayat 39



Artinya : “ Dan Suatu rida (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”

Dari ayat diatas jelas riba dilarang dalam islam. Sekarang timbul persoalan apakah bunga kredit diperoleh atau tidak, karena bunga kredit merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Berbagai pendapat berkembang dikalangan ulama kontemporer selaras dengan perkembangan dunia pengkoperasian dan lembaga-lembaga keuangan non koperasi yang memberikan kredit kepada masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman untuk kepentingan konsumsi sedangkan untuk kepentingan produksi tidak diharamkan. Karena alat riba ialah adanya sifat pemerasan dan pemerasan ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif, debitur bermaksud menggunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain.

Dr. Dawibi salah satu pendukung pendapat ini berkata “Sesungguhnya syari'at islam menganggap imbalan dari jasa pinjaman betapapun kecil cukup dipandang masuk kategori riba yang diharamkan Allah” tapi selanjutnya beliau mengatakan pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman yang konsumtif karena mengambil keuntungan. Pinjaman semacam ini merupakan salah satu

bentuk manipulasi terhadap keadaan orang terjepit. Selanjutnya beliau mengatakan Islam telah memberikan alternatif sebagai berikut:

1. Tetap mengharamkan imbalan dari pinjaman konsumtif dan tidak produktif, tetapi negara membentuk badan-badan usaha untuk mengembangkan sektor produktif.
2. Membedakan antara pinjaman produktif dan tidak produktif, debitur miskin dan debitur kaya. Pinjaman di sektor produktif dibenarkan menarik bunga, sedangkan pada pinjaman konsumtif diharamkan.

Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa bunga yang diharamkan ialah yang berganda-ganda saja, karena dalam riba yang berganda terdapat sipat pemerasan. Adapun bunga yang kecil tidak diharamkan karena tidak terdapat pemerasan dan penumpukan kekayaan. Dr. Muhammad Hatta berpendapat bunga koperasi untuk kepentingan produktif bukan riba, tetapi untuk kepentingan konsumtif adalah riba. Kasman Singodimerjo dan Syafrudin Prawiranegara berpendapat sistem pengkoperasian modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim.

B . TINJAUAN PRAKTEK

3.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru

Adapun sistem pemberian kredit pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru adalah:

1. Pengambilan formulir

Nasabah dapat mengambil formulir agar mengetahui syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Photo copy KTP peminjam dan ahliwaris
- b. Photo copy kartu keluarga
- c. Photo copy jaminan
- d. pas foto 3 x 4 = 2 lembar peminjam dan ahliwaris
- e. Surat keterangan usaha minimal dari kelurahan

Secara khusus kredit yang terdapat pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru ini terdapat tiga macam kredit yaitu:

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Modal Kerja Umum (MKU),
3. Kredit Bakulan dan Kredit Perkebunan.

Adapun pinjaman untuk kredit adalah Rp. 500.000,- s/d 10.000.000,- keatas dengan jangka waktu kredit yang telah ditetapkan yaitu 6 s/d 12 bulan dengan bunga 18 % pertahun.

Contoh cara penghitungan pokok pinjaman dan bunga

Pokok pinjaman (PJ)

$$PJ = \frac{\text{Jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$= \frac{1.000.000,-}{24 \text{ minggu}}$$

$$= \text{Rp. 4.166,-}$$

Bunga (BG)

$$BG = \frac{\text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$= \frac{18 \% \times \text{Rp.}1.000.000,}{48 \text{ minggu}}$$

$$= \text{Rp. } 7.500,-$$

Jadi, angsuran tiap bulannya adalah:

$$\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} = 4.166 + 7.500$$

$$= \text{Rp. } 11.666,-$$

Pokok Pinjaman Rp. 11.666,-

Tabungan beku Rp. 834,- +

Jumlah angsuran Rp. 12.500,-

Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tersebut setiap minggunya adalah Rp.12.500,-

Tabungan beku adalah tabungan yang dari setoran pinjaman yang prosesnya dilakukan setelah akhir hari dan ditransfer secara otomatis keesokan harinya ke tabungan nasabah peminjam atau pemegang kredit dengan pembulatan jumlah setoran pinjaman.

2 Setelah pengambilan formulir, nasabah dapat mengajukan berkas atau pun syarat-syarat yang harus diserahkan kepada pihak bank.

3. Setelah menerima berkas tersebut, pihak bank dapat meninjau kembali apakah layak atau tidak layak untuk diberikan pinjaman.

4. Apabila usaha tersebut layak, barulah proses berkas-berkas yang diberikan untuk nasabah kepada pihak bank (memenuhi syarat)

5. Setelah disetujui, nasabah dapat datang kembali ke bank untuk akad kredit, dimana nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit

dan apabila surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani maka surat pengesahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit karena telah tegas disebutkan nomor dan tanggalnya.

6. Pencairan, bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah. Bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan, pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan perjanjian-perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Adapun syarat-syarat pengajuan kredit untuk para karyawan adalah sebagai berikut:

1. Photo copy KTP (suami/istri) dan kartu keluarga (rangkap 2)
2. Photo copy surat nikah (rangkap 2)
3. SK pertama (SK calon pegawai dan SK pegawai penuh) (rangkap 2)
4. SK terakhir (rangkap 2)
5. Kartu pegawai/kartu asabri (rangkap 2)
6. Taspen (rangkap 2)
7. Daftar rincian gaji (rangkap 2)
8. Rekomendasi dari kepala dinas/instansi/perusahaan (rangkap 2)
9. MoU antara direksi bank sarimadu dengan kepala dinas instansi perusahaan (rangkap 2)

10. Surat kuasa pemotongan gaji dari kepala dinas/instansi/perusahaan
(rangkap 2)

Sedangkan syarat-syarat untuk kredit bakulan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan pendapatan kredit untuk maksimal Rp 2.000.000 tanpa jaminan fisik adalah :
 - a. Berada dalam lokasi wilayah kerja bank PD. BPR Sarimadu
 - b. Surat keterangan usaha yang tetap pada lokasi pasar
 - c. Identitas diri (KTP dan pas photo) suami dan istri
 - d. Foto copy kartu keluarga
2. Persyaratan pendapatan kredit sampai dengan Rp. 5.000.000 adalah:
 - a. Berda dalam lokasi wilayah kerja bank PD. BPR Sarimadu
 - b. Mempunyai keterangan tempat usaha yang tetap pada lokasi pasar
 - c. Identitas diri (KTP dan pas photo) suami dan istri
 - d. Foto copy kartu keluarga
 - e. Jaminan tambahan yang berupa sertifikat hak milik, SKPT (Surat Keterangan Pemilik Tanah), SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi), BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

3.2 Langkah-langkah Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru Dalam Penanganan Kredit bermasalah (macet)

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias macet yang mana nasabahnya tidak mampu lagi melunasi kreditnya.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru dalam penanganan kredit bermasalah.

1. Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya tersebut dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirim surat teguran mulai dari surat teguran pertama sampai surat teguran ketiga.
2. Nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kredit dikenakan denda 0,5 % dari tunggakan per bulan.
3. Memperpanjang jangka waktu kredit dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.
4. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36

kali menjadi 48 kali. Dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

5. Kapasitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
6. Penundaan sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
7. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh: jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%.
8. Pembebasan bunga, dalam pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
9. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan:

1. Permohonan kredit yang diajukan calon debitur Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru, untuk memberikan keputusan apakah kredit diterima atau ditolak apabila usahanya itu layak, barulah diproses berkas-berkas yang diberikan untuk nasabah kepada pihak bank (memenuhi syarat). Analisis tersebut dilakukan dari berbagai aspek yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu aspek yang penting dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan calon debitur. Namun dalam pengajuan permohonan kredit pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru sebaiknya ada laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan jumlah NPL (*Non Performing Loan*) kredit investasi paling besar dibandingkan dengan kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Jumlah itu juga mengalami peningkatan dari tahun 2007-2008 yaitu 0,83 % menjadi 1,40 %.
2. Setelah kredit diberikan kepada debitur, Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur terutama yang berada di luar kota.

3. Pada struktur organisasi Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru tidak terdapat *debt collector*. Tugas menagih kredit macet dilakukan oleh analis kredit.

4.2 Saran

1. Sebaiknya dalam pengajuan permohonan kredit pada Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru, calon debitur harus menyertakan laporan keuangan usahanya. Jika calon debitur berpotensi namun tidak dapat membuat laporan keuangan, maka analis kredit dapat memberikan bimbingan.
2. Seharusnya pemantauan secara berkala terhadap usaha debitur dilakukan oleh pihak Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. Pemantaun itu berguna untuk mendeteksi gejala dini terjadi indekasi-indekasi yang merupakan potensial kredit bermasalah, sehingga dapat segera ditanggulangi.
3. Pada struktur organisasi Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru sebaiknya ada *debt collector*, sehingga tidak terjadi lagi rangkap tugas yang dilakukan oleh bagian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Untung, Budi, 2000, Kredit Perbankan Di Indonesia, Penerbit Andi Yogyakarta.

Siamet, Dahlan, 2001, Manajemen Keuangan, cetakan ke-1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Kasmir,SE,MM, 2006, Manajemen Perbankan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2002, Dasar-Dasar Perbankan Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Malayu, SP, Hasibuan, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Penerbit PT. Bumi Aksara.

A. Hall, 2001, Sistam Informasi Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Muslehuddin, Muhammad, 2004, Sistem Perbankan Dalam Islam, Cetakan Ketiga, PT. Rinika Cipta, Jakarta.

Susilo, Sri, dkk, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Suyatno, dkk, 2007, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat, PT. Gramidia Pustaka Utama Jakarta.

Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Dokumen Bank PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kredit Yang Disalurkan Priode 2007-2008	5
Tabel 1.2 Daftar Posisi Kualitas Kredit Yang Disalurkan Priode 2007-2008	5

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Bank PD.BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru	16
---	----